

BAB V

KESIMPULAN

Berbagai permasalahan muncul di awal kemerdekaan, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 harus menghadapi berbagai permasalahan baik di bidang politik maupun sosial-ekonomi. Kondisi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat buruk. Proses pergantian pemerintah dari kolonial ke Republik menimbulkan gejolak di semua aspek kehidupan bernegara. Atmosfer politik pada saat itu juga masih tidak menentu. Ancaman baik dari luar ataupun dalam negeri sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Sehingga di awal kemerdekaan yang menjadi fokus pemerintah adalah pengakuan kedaulatan, di samping membenahi keadaan sosial-ekonomi pada saat itu.

Selain permasalahan politik mengenai pengakuan kedaulatan yang harus di hadapi Indonesia di awal kemerdekaan, Indonesia juga harus menghadapi kondisi ekonomi yang mengalami kekacauan seperti: kehancuran di sektor produksi, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, inflasi tinggi karena beredarnya banyak mata uang serta kekosongan kas negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi tersebut yaitu mulai memberdayakan peran lembaga perbankan yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, Pemerintah mulai menargetkan untuk mengambil alih sektor perbankan demi menjaga kekuatan ekonomi

Indonesia. Salah satu bank yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia adalah *Syomin Ginko*. Pemilihan bank ini dinilai karena cukup aktif berperan pada masa pendudukan Jepang dan bank ini telah memiliki cabang yang cukup menyebar di berbagai daerah di Indonesia yang pada saat itu kordinasi kerja disesuaikan dengan pembagian wilayah angkatan bersenjata Jepang. Walaupun pada saat itu juga, mulai diajukan gagasan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) oleh Magrono Djojohadikusumo namun gagasan tersebut masih membutuhkan dana, waktu dan persiapan yang lebih matang dalam pendirian bank baru.

Tepat pada tanggal 22 Februari 1946 sesuai dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 berdasarkan usul Menteri Kemakmuran pada saat itu Ir. Darmawan Mangunkusumo, bank yang dahulunya bernama *Syomin Ginko* resmi dinasionalisasikan menjadi BRI bank milik Pemerintah Indonesia. Nasionalisasi ini merupakan langkah awal yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti: masalah produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, serta status administrasi perkebunan-perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam pasal 2 disebutkan bahwa wilayah kerja BRI adalah seluruh Indonesia, dengan demikian secara *de facto* maupun *de jure* BRI menjadi bank pemerintah pertama sebagai pelengkap negara Indonesia yang baru merdeka.

Setelah nasionalisasi BRI ini terlaksana, nasabah utama dan pertama BRI adalah pemerintah sendiri. Atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibagi menjadi dua tahap. Pada waktu itu pemerintah memang membutuhkan banyak dana yang bersifat mendesak. Pinjaman nasional itu digunakan pemerintah untuk keperluan PMR (Persediaan Makanan Rakyat) dan RAPWI (*Rescue of Allied Prisoners of War and Internees*), dan berbagai keperluan mendadak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, BRI juga memberikan suntikan dana bagi Yayasan Pusat Bank yang hendak mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI).

Pelaksanaan pinjaman tersebut dinilai sukses dalam memperbaiki kondisi yang sedang genting. Sukses yang dicapai oleh pemerintah itu dapat dijadikan ukuran bagi dukungan rakyat. Ditinjau dari segi politik, sukses ini menunjukkan kekeliruan terhadap perhitungan pihak Belanda mengenai kekuatan ekonomi Indonesia yang akan ambruk.

Kondisi perpolitikan yang tidak stabil di awal kemerdekaan, membuat pusat BRI terpaksa pindah ke Purwokerto. Kota Purwokerto sebagai kota administratif merupakan kota yang sangat penting dalam sejarah dinamika BRI. Saat Jakarta tidak memungkinkan digunakan sebagai pusat pemerintahan, pusat administrasi BRI dipindahkan ke Purwokerto. Hal ini tidak terlepas dari kesiapan Purwokerto untuk dijadikan sebagai salah satu pusat administratif.

Perkembangan BRI di masa revolusi banyak mengalami tantangan dan ancaman yang menjadi pasang surut lembaga keuangan ini dalam mendampingi negara Indonesia di awal kemerdekaan, mulai dari awal penetapan tahun 1946 dengan semangat kemerdekaan yang berkobar-kobar ikut membakar semangat baru perekonomian. Berbagai kebijakan dilakukan oleh BRI seperti menerima simpanan masyarakat, memberikan pinjaman baik nasional, menengah maupun rakyat kecil serta kebijakan khusus yang diberikan pemerintah kepadanya seperti penarikan uang Jepang untuk menyambut peredaran ORI.

Namun pada tahun 1947 perkembangan BRI mulai terganggu karena adanya Agresi Militer I yang dilancarkan oleh Belanda dan semakin diperparah dengan adanya Agresi Militer II di tahun 1948, tahun ini menjadi tahun berat bagi perkembangan BRI karena operasional BRI sempat terhenti. Berbagai perundingan yang dilakukan pihak Indonesia dan Belanda untuk mencapai kesepakatan bersama membawa titik terang di dalam Perundingan Roem-Royen, hal tersebut pula berdampak baik bagi kembali aktif-nya BRI, walaupun BRI harus menjalankan dualisme kepemimpinan dan berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat (BARRIS) pada tahun 1949.

Pada kurun waktu 1950 perkembangan BRI relatif meningkat dan jauh lebih baik kondisinya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi yang semakin baik ini disebabkan oleh faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern itu adalah keadaan sosial-politik Indonesia yang semakin mantap akibat adanya pengakuan kedaulatan. Keadaan ini mampu membentuk iklim perekonomian yang

mendukung usaha perbankan. Sedangkan, faktor intern ditandai oleh kemampuan pegawai yang membaik serta dukungan oleh penyempurnaan sistem administrasi.

Keberadaan BRI ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Purwokerto di awal kemerdekaan, yang senantiasa memberikan pelayanan bagi semua lapisan masyarakat membawa dampak yang positif dan sangat baik bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Purwokerto. Selain itu juga berdampak pada psikologis masyarakat dengan mendidik rakyat untuk menabung dan berhemat.

